



PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Gorontalo;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 22. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 478/29/XII Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor);

MEMUTUSKAN:

etapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Umum Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 988.979.729.509,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari :

Pendapatan asli daerah;

Pendapatan transfer;

Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.144.688.155,00 (tiga puluh tiga milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.740.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah):

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.269.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah):

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.885.688.155,00 (tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.740.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pajak hotel Rp. 25.000.000;
- b. Pajak restoran Rp. 1.450.000.000;
- c. Pajak hiburan Rp. 5.000.000;
- d. Pajak reklame Rp. 260.000.000;
- e. Pajak penerangan jalan Rp. 3.600.000.000;
- f. Pajak sarang burung walis Rp. 100.000.000;
- g. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp. 1.400.000.000;
- h. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp.1.100.000.000;
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 800.000.000.

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.269.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas :

- a. Retribusi jasa umum Rp. 6.980.000.000,00

- b. Retribusi jasa usaha Rp. 284.000.000,00
- c. Retribusi perizinan tertentu Rp. 5.000.000,00

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp. 3.250.000.000,00.

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.885.688.155,00 (tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp. 25.000.000,00
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp. 7.500.000,00
- c. jasa giro Rp. 1.450.000.000,00
- d. pendapatan bunga Rp. 2.750.000.000,00
- e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp. 1.500.000.000,00
- f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp. 50.000.000,00
- g. pendapatan Denda Pajak Daerah Rp. 17.500.000,00
- h. pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp. 25.000.000,00
- i. pendapatan dari Pengembalian Rp. 15.000.000,00
- j. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp. 8.045.688.155

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 726.464.871.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
- b. pendapatan transfer antar daerah

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 706.214.871.000,00 (tujuh ratus

enam milyar dua ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.250.000.000,00 (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 706.214.871.000,00 (tujuh ratus enam milyar dua ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Dana perimbangan Rp. 613.062.131.000,00
- b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 1.272.014.000,00
- c. Dana Desa Rp. 91.880.726.000,00

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.250.000.000,00 (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp. 20.250.000.000,00.

Pasal 8

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0 ,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :

- a. pendapatan hibah; dan
- b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri dari pendapatan hibah dana Bos sebesar Rp.0,00.

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 976.341.688.422,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas :

- Belanja operasional;
- Belanja modal;
- Belanja tidak terduga; dan
- Belanja transfer.

Pasal 11

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 477.539.574.166,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 267.857.407.219,00 (dua ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 191.445.679.571,00 (seratus sembilan puluh satu milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.179.907.201 (sembilan milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus satu rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp- (nol rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 6.454.580.175,00 (enam milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.602.000.000,00 (dua milyar enam ratus dua juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.267.857.407.219,00 (dua ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji dan tunjangan; ASN
- b. Belanja Tambahan penghasilan ASN;
- c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya / ASN
- d. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. Belanja Pegawai BOS
- h. Belanja Pegawai BLUD

Belanja Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 169.260.653.419,00 (seratus enam puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.979.324.695,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 46.688.861.497,00 (empat puluh enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.452.341.344,00 (delapan milyar empat

ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 169.226.264,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.392.400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.914.600.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 13

Belanja Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 169.260.653.419,00 (seratus enam puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. gaji pokok ASN Rp. 123.773.403.656,00
- b. tunjangan keluarga ASN Rp. 11.462.679.172,00
- c. tunjangan jabatan ASN Rp. 5.895.123.500,00
- d. tunjangan fungsional ASN Rp. 8.591.330.650,00
- e. tunjangan fungsional umum ASN Rp. 1.323.043.652,00
- f. tunjangan beras ASN Rp. 7.237.722.268,00
- g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN Rp. 286.326.656,00
- h. pembulatan gaji ASN Rp. 2.223.865,00
- i. iuran jaminan Kesehatan ASN Rp. 9.700.800.000,00
- j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN Rp. 268.000.000,00
- k. iuran jaminan kematian ASN Rp. 720.000.000,00

Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.979.324.695,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN
Rp. 1.553.800.000,00
- b. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN
Rp. 36.425.524.695,00

Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 46.688.861.497,00 (empat puluh enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah Rp. 428.568.000,00
- b. tunjangan profesi guru (TPG) PNSD Rp. 31.608.925.000,00
- c. tunjangan khusus guru (TKG) PNSD Rp. 2.963.769.000,00
- d. tambahan penghasilan (tamsil) Guru PNSD Rp. 1.911.000.000,00
- e. jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp. 9.607.628.497,00
- f. honorarium Rp. 168.971.000,00

Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.452.341.344,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

- a. Uang representasi DPRD Rp. 521.430.000,00
- b. Tunjangan keluarga DPRD Rp. 51.129.546,00
- c. Tunjangan beras DPRD Rp. 72.014.735,00
- d. Uang paket DPRD Rp. 40.690.000,00
- e. Tunjangan jabatan DPRD Rp. 819.079.625,00
- f. Tunjangan alat kelengkapan DPRD Rp. 91.172.380,00
- g. Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD Rp. 13.702.500,00
- h. Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD
Rp. 1.575.000.000,00
- i. Tunjangan reses DPRD Rp. 393.750.000,00
- j. Tunjangan pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
Rp. 42.633.030,00
- k. Pembulatar gaji DPRD Rp. 122.184,00
- l. Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD
Rp. 2.616.117.344,00
- m. Tunjangan transportasi DPRD Rp. 2.178.000.000,00
- n. Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp. 37.500.000,00

Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 169.226.264,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari :

- a. Gaji pokok KDH/WKDH Rp. 56.599.998,00
- b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp. 6.468.000,00
- c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp. 98.280.000,00
- d. Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp. 6.083.280,00
- e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp. 1.794.072,00
- f. Pembuiatan Gaji KDh/WKDH Rp. 914

Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.392.400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a. Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp 92.400.000,00
- b. Dana Operasional KDH/WKDH Rp 300.000.000,00

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.914.600.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas belanja pegawai BOS sebesar Rp. 4.914.600.000,00

Pasal 14

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 191.445.679.571,00 (seratus sembilan puluh satu milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima .atus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOS;
- g. belanja barang dan jasa BLUD.

Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.194.190.685,00 (lima puluh delapan milyar seratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja barang pakai habis sebesar Rp. 58.194.190.685,00

Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 74.364.614.301,00 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja jasa kantor Rp. 59.040.075.166,00
- b. belanja iuran jaminan/asuransi Rp. 4.925.634.980,00
- c. belanja sewa tanah Rp. 103.000.000,00
- d. belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 5.326.110.000,00
- e. belanja sewa gedung dan bangunan Rp. 1.488.883.400,00
- f. belanja jasa konsultasi konstruksi Rp. 852.986.355,00
- g. belanja jasa konsultasi non konstruksi Rp. 525.000.000,00
- h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta Pendidikan dan pelatihan Rp. 2.002.924.400,00
- i. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp. 100.000.000

belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.999.378.573,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp. 1.529.393.927,00
- b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp. 1.692.884.646,00
- c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Rp. 759.100.000,00
- d. belanja pemeliharaan asset tetap lainnya Rp. 18.000.000,00

belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 38.103.097.741,00 (tiga puluh delapan milyar seratus tiga juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 38.103.097.741,00

belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp. 6.072.829.000,00 (enam milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp. 4.880.500.000,00
- b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp. 1.192.329.000,00

belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.711.569.271,00 (sebelas milyar tiga ratus enam juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.179.907.201 (sembilan milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus satu rupiah), yang terdiri atas belanja Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp. 9.179.907.201,00

Pasal 16

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.454.580.175,00 (enam milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
- b. Belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar Rp0,00

Anggaran belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.752.200.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp 605.000.000,00
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp. 4.417.200.000
- c. belanja hibah kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan Rp. 730.000.000,00

belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 702.380.175,00 (tujuh ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.602.000.000,00 (dua milyar enam ratus dua juta rupiah), yang terdiri atas :

- a. bantuan sosial kepada individu; dan
- b. bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

Anggaran bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.602.000.000,00 (dua milyar enam ratus dua juta rupiah).

Anggaran bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), yang terdiri dari bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat Rp 0,00

Pasal 18

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 359.944.334.829,00 (tiga ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal Gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

- e. belanja modal asset tetap lainnya
- f. belanja modal asset lainnya BLUD

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.532.836.319,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Tanah Persil Rp. 3.382.836.319,00
- b. Belanja Modal Lapangan Rp. 150.000.000,00

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 61.028.918.177,00 (enam puluh satu milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Alat Besar Rp. 8.500.000,00.
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp. 1.640.954.861,00
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 110.000.000,00
- d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp. 1.250.216.202,00
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 1.785.334.124,00
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp.116.943.343,00
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp. 43.821.766.209,00
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp. 1.839.150.740,00
- i. Belanja Modal Komputer Rp. 1.981.870.035,00
- j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp. 9.302.400,00
- k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp. 8.464.880.263

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.94.179.804.413,00 (sembilan puluh empat milyar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu empat ratus tiga belas rupiah) yang terdiri dari

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 92.777.000.681,00
- b. Belanja Modal Monumen Rp. 187.000.000,00
- c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp. 1.215.803.732,00

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 200.200.901.458,00 (dua ratus milyar dua ratus juta sembilan ratus satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp. 184.468.723.801,00

- b. Belanja Modal Bangunan Air Rp. 5.359.666.301,00
- c. Belanja Modal Instalasi Rp. 10.106.511.356,00
- d. Belanja Modal Jaringan Rp. 266.000.000,00

Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.001.874.462,00 (satu milyar satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp. 17.925.940,00
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp.459.000,00
- c. Belanja Modal Hewan Rp. 24.010.800
- d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp. 175.920.000,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp. 807.569.522,00

Pasal 19

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah).

Pasal 20

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp 134.657.779.427,00 (seratus tiga puluh empat milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja bagi hasil
- b. Belanja bantuan keuangan

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kabupaten/kota dan desa Rp 598.784.788,00
- b. Belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/kota kepada pemerintah desa Rp 401.215.212,00

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 133.657.779.427,00 (seratus tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan

ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau Kabupaten/kota kepada desa sebesar Rp. 133.657.779.427,00

Pasal 21

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 216.732.129.267,00 (dua ratus enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- Penerimaan pembiayaan; dan
- Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 22

-) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp 229.370.170.354,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
-) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 36.370.170.354 (tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
-) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).
-) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).
-) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 193.000.000.000 (seratus sembilan puluh tiga milyar rupiah).
-) Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).

Pasal 23

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp 12.638.041.087 (dua belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- d. Pemberian pinjaman daerah; dan
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 11.138.041.087 (sebelas milyar seratus tiga puluh delapan juta empat puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).

Pasal 24

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp 216.732.129.267,00) (minus dua ratus enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 216.732.129.267,00 (dua ratus enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 25

Lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 26

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

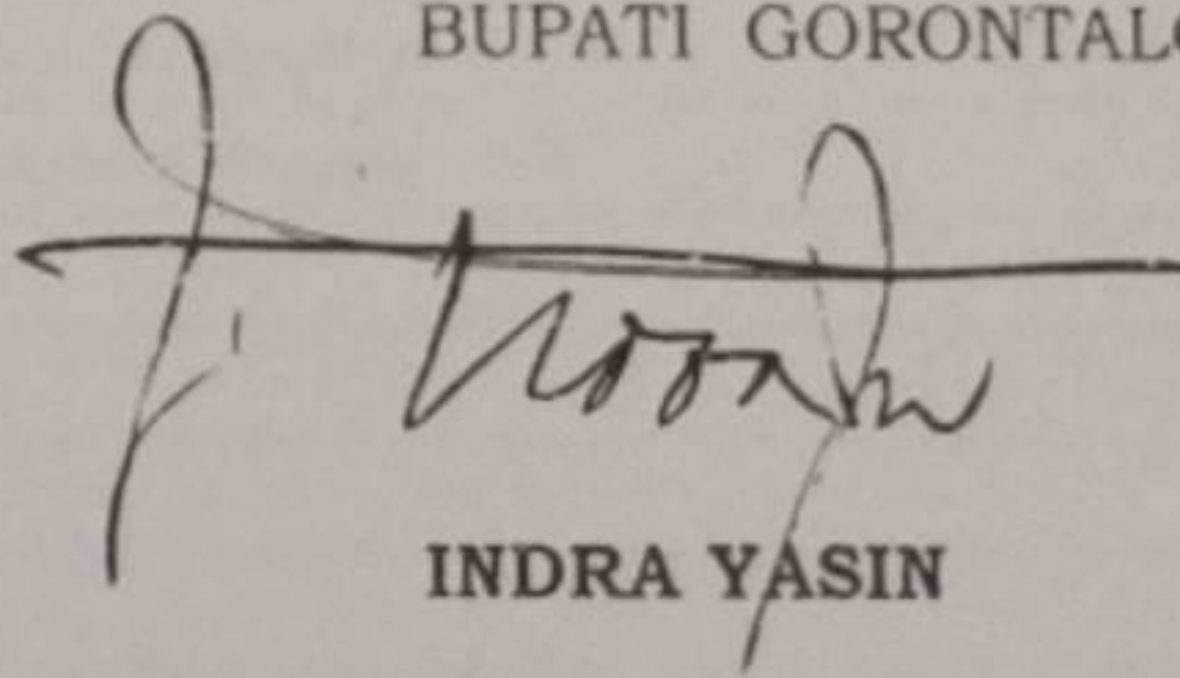
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Untuk setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kwardang
pada tanggal 31 Desember 2021

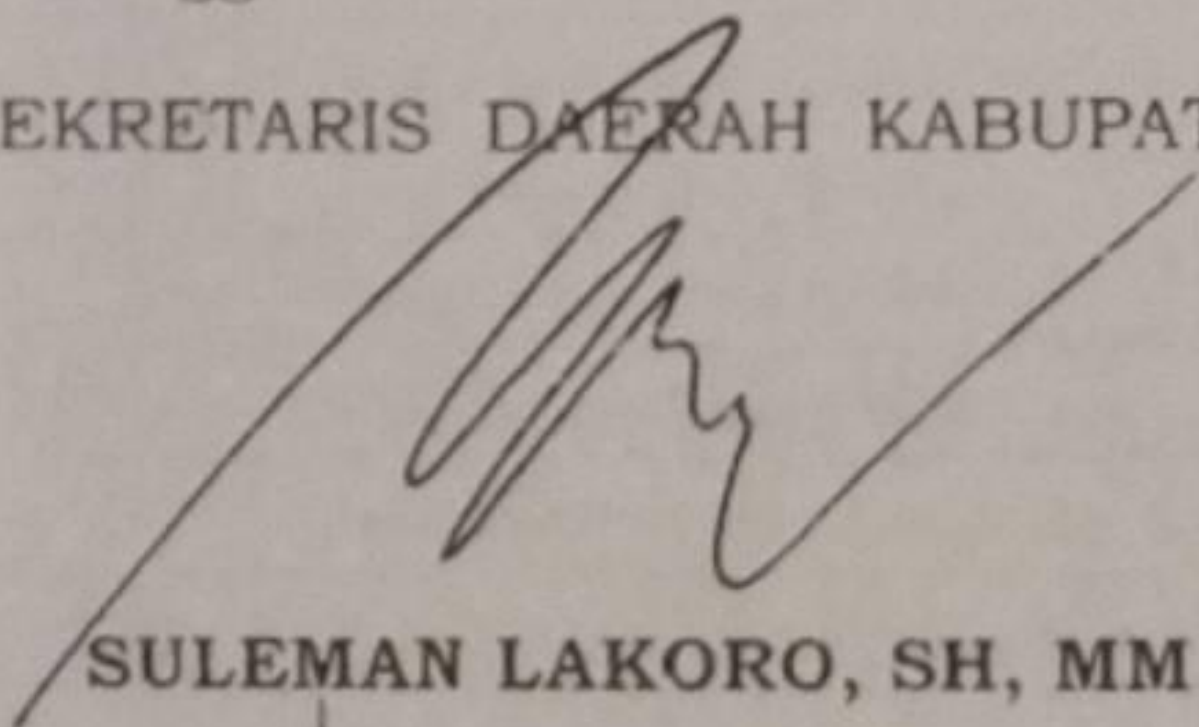
BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwardang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



SULEMAN LAKORO, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR
5 TAMBAHAN BERITA DAERAH NOMOR 484

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

le	Uraian	Jumlah
	PENDAPATAN DAERAH	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.144.688.155
	Pajak Daerah	8.740.000.000
	Pajak Hotel	25.000.000
01	Pajak Hotel	10.000.000
01.0001	Pajak Hotel	10.000.000
07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	5.000.000
07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	5.000.000
08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	10.000.000
08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	10.000.000
	Pajak Restoran	1.450.000.000
02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	700.000.000
02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	700.000.000
07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	750.000.000
07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	750.000.000
	Pajak Hiburan	5.000.000
05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	2.000.000
05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	2.000.000
06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	3.000.000
06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	3.000.000
	Pajak Reklame	260.000.000
01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	250.000.000
01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	250.000.000
03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	5.000.000
03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	5.000.000
05	Pajak Reklame Berjalan	5.000.000
05.0001	Pajak Reklame Berjalan	5.000.000
	Pajak Penerangan Jalan	3.600.000.000
01	Pajak Penerangan Jalan Dinasilkan Sendiri	3.600.000.000
01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	3.600.000.000
	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000
01	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000
01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.400.000.000
07	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.400.000.000

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

e	Uraian	Jumlah
17.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.400.000.000
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.100.000.000
11	PBBP2	1.100.000.000
11.0001	PBBP2	1.100.000.000
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	800.000.000
11	BPHTB-Pemindahan Hak	300.000.000
11.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	300.000.000
12	BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000
12.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000
	Retribusi Daerah	7.269.000.000
	Retribusi Jasa Umum	6.980.000.000
11	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.100.000.000
11.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	100.000.000
11.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	6.000.000.000
12	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.000.000
12.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.000.000
14	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	25.000.000
14.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	25.000.000
15	Retribusi Pelayanan Pasar	540.000.000
15.0001	Retribusi Pelataran	490.000.000
15.0002	Retribusi Los	50.000.000
16	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	175.000.000
16.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	175.000.000
1	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000
1.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	10.000.000
3	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	120.000.000
3.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	120.000.000
	Retribusi Jasa Usaha	284.000.000
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	71.000.000
1.0007	Retribusi Pemakaian Alat	71.000.000
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	70.000.000
2.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	40.000.000
2.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	30.000.000
3	Retribusi Tempat Pelelangan	63.000.000
3.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	63.000.000

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

	Uraian	Jumlah
	Retribusi Terminal	5.000.000
1.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	5.000.000
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.000.000
1.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.000.000
	Retribusi Perizinan Tertentu	5.000.000
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000
1.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.250.000.000
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.250.000.000
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.250.000.000
0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.250.000.000
	Lain-lain PAD yang Sah	13.885.688.155
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	25.000.000
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	25.000.000
0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	25.000.000
	Hasil Pemanfaatan EMD yang Tidak Dipisahkan	7.500.000
	Hasil Sewa BMD	7.500.000
0001	Hasil Sewa BMD	7.500.000
	Jasa Giro	1.450.000.000
	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.400.000.000
0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.400.000.000
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000
0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000
	Pendapatan Bunga	2.750.000.000
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.750.000.000
0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.750.000.000
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.000.000.000
0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.000.000.000
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.400.000.000
0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.400.000.000

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

e	Uraian	Jumlah
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000
01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000
01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	17.500.000
5	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.000.000
5.0001	Pendapatan Denda PBBP2	10.000.000
6	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.500.000
6.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	7.500.000
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	25.000.000
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	5.000.000
1.0013	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	5.000.000
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	20.000.000
2.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0
2.0006	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	20.000.000
	Pendapatan dari Pengembalian	15.000.000
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	15.000.000
3.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	15.000.000
	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.045.688.155
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.045.688.155
1.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.045.688.155
	PENDAPATAN TRANSFER	726.464.871.000
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	706.214.871.000
	Dana Perimbangan	613.062.131.000
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	9.653.503.000
1.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.234.491.000
1.0002	DBH PPh Pasal 21	2.268.493.000
1.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	251.000
1.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	231.442.000
1.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	377.664.009.000
2.0001	DAU	377.664.009.000
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	147.013.570.000
3.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	667.359.000
3.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	28.577.36.000

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

e	Uraian	Jumlah
3.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.506.347.000
3.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.130.925.000
3.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	516.480.000
3.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	4.161.952.000
3.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	6.907.341.000
3.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	819.712.000
3.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.891.742.000
3.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	4.188.381.000
3.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	7.588.710.000
3.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.447.000.000
3.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	5.403.961.000
3.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	6.368.513.000
3.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.960.359.000
3.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.532.365.000
3.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.433.843.000
3.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	77.630.844.000
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	78.731.049.000
4.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	18.257.460.000
4.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	31.608.925.000
4.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.911.000.000
4.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.963.769.000
4.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.745.800.000
4.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.009.900.000
4.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	15.120.824.000
4.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	149.802.000
4.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	402.873.000
4.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	2.842.596.000
4.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	718.100.000
	Dana Insentif Daerah (DID)	1.272.014.000
1	DID	1.272.014.000
1.0001	DID	1.272.014.000
	Dana Desa	91.880.726.000
1	Dana Desa	91.880.726.000
1.0001	Dana Desa	91.880.726.000

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

	Uraian	Jumlah
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.250.000.000
	Pendapatan Bagi Hasil	20.250.000.000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.250.000.000
.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.745.000.000
.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.975.000.000
.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.250.000.000
.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	25.000.000
.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.255.000.000
	Jumlah Pendapatan	759.609.559.155
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	477.539.574.166
	Belanja Pegawai	267.857.407.219
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	169.260.653.419
	Belanja Gaji Pokok ASN	123.773.403.656
1.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	117.865.810.706
1.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	5.907.592.950
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	11.462.679.172
2.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11.154.914.064
2.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	307.765.108
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.895.123.500
3.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.895.123.500
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.591.330.650
4.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.591.330.650
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.323.043.652
5.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.105.928.152
5.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	217.115.500
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	7.237.722.268
6.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.112.469.728
6.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	125.252.540
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.863.266.656
7.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.863.266.656
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.223.865
8.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.034.788
8.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	189.077

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

	Uraian	Jumlah
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.700.800.000
1.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.700.800.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	268.000.000
1.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	268.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	720.000.000
1.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	720.000.000
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	37.979.324.695
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.553.800.000
1.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.553.800.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	36.425.524.695
1.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	36.425.524.695
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.688.861.497
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	428.568.000
1.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	428.568.000
	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	31.608.925.000
3.0001	Belanja TPG PNSD	31.608.925.000
	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.963.769.000
4.0001	Belanja TKG PNSD	2.963.769.000
	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.911.000.000
5.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.911.000.000
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.607.628.497
5.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.607.628.497
	Belanja Honorarium	168.971.000
7.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	60.000.000
7.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	108.971.000
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.452.341.344
	Belanja Uang Representasi DPRD	521.430.000
1.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	521.430.000
	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	51.129.546
2.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	51.129.546
	Belanja Tunjangan Beras DPRD	72.014.735
3.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	72.014.735
	Belanja Uang Paket DPRD	40.690.000
4.0001	Belanja Uang Paket DPRD	40.690.000

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

	Uraian	Jumlah
	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	819.079.625
0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	819.079.625
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	91.172.380
0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	91.172.380
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.702.500
0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.702.500
	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.575.000.000
0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.575.000.000
	Belanja Tunjangan Reses DPRD	393.750.000
0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	393.750.000
	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	42.633.030
0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	42.633.030
	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	122.184
0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	122.184
	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.616.117.344
0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	40.900.000
0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	611.708
0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	605.636
0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.574.000.000
	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.178.000.000
0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.178.000.000
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	37.500.000
0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	37.500.000
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	169.226.264
	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.599.998
0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.599.998
	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.468.000
0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.468.000
	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280
0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.794.072
0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.794.072
	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	914

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

	Uraian	Jumlah
0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	914
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	392.400.000
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	92.400.000
0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	92.400.000
	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000
0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000
	Belanja Pegawai BOS	4.914.600.000
	Belanja Pegawai BOS	4.914.600.000
3888	Belanja Pegawai BOS	4.914.600.000
	Belanja Barang dan Jasa	191.445.679.571
	Belanja Barang	58.194.190.685
	Belanja Barang Pakai Habis	58.194.190.685
0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	360.586.704
0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.853.140
0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.142.931.522
0005	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	229.463.037
0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	181.731.000
0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	193.037.265
0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	949.112.934
0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.589.810.056
0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.143.337.350
0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.078.524.315
0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.814.314.782
0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.293.371.000
0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	22.126.658
0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.648.862.045
0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	36.915.600
0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	29.557.600
0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	88.875.000
0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	542.434.400
0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.911.093.893
0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.004.471.840
0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	25.290.362.276
0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	43.758.000

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

	Uraian	Jumlah
043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	700.044.600
044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	16.500.000
052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.341.614.550
053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.211.393.208
057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	364.130.309
058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	274.514.750
059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	6.680.300
060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	115.416.146
061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	3.020.000
062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	20.611.056
063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	555.580.008
064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	15.750.000
067	Belanja Pakaian Penyelamatan	1.800.000
071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	37.620.000
073	Belanja Pakaian KORPRI	2.760.000
074	Belanja Pakaian Adat Daerah	60.615.000
076	Belanja Pakaian Olahraga	1.579.040.000
077	Belanja Pakaian Paskibraka	1.907.063.340
	Belanja Jasa	74.364.614.301
	Belanja Jasa Kantor	59.040.075.156
0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.829.930.000
0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.469.089.760
0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	2.520.000.000
0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.254.350.000
0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	1.500.000.000
0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.331.400.000
0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.978.700.000
0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	3.600.000
0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.036.600.000
0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.497.600.000
0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.352.000.000
0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	2.895.500.000
0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	18.540.000
0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	60.600.000
0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	7.296.600.000

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

	Uraian	Jumlah
1.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.383.800.000
1.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	11.013.200.000
1.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.616.500.000
1.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.244.400.000
1.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.853.030.000
1.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.169.500.000
1.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	153.900.000
1.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.142.050.000
1.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	204.000.000
1.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	13.200.000
1.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	129.600.000
1.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.752.378.486
1.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	25.000.000
1.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	71.589.600
1.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	20.000.000
1.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.100.580.000
1.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	88.800.000
1.0059	Belanja Tagihan Telepon	24.825.000
1.0060	Belanja Tagihan Air	205.500.000
1.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.189.376.000
1.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	393.205.000
1.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.478.677.320
1.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.200.000
1.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	244.950.000
1.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	169.104.000
1.0073	Belanja Medical Check Up	195.000.000
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.925.634.980
1.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.829.688.196
1.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	39.764.912
1.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	51.181.872
1.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	5.000.000
	Belanja Sewa Tanah	1.030.000.000
1.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.030.000.000
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.326.110.000
1.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.120.050.000

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

	Uraian	Jumlah
0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.500.000
0118	Belanja Sewa Mebel	16.500.000
0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.000.000
0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	25.000.000
0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	90.000.000
0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	44.060.000
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.488.883.400
0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	75.745.000
0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.368.138.400
0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	45.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	852.986.355
0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	57.545.068
0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	385.000.000
0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	200.000.000
0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	83.600.000
0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	21.841.287
0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	25.000.000
0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	80.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.250.000.000
0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	5.250.000.000
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.002.924.400
0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.149.325.000
0002	Belanja Sosialisasi	1.79.070.000
0003	Belanja Bimbingan Teknis	674.529.400
	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.000.000.000
0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1.000.000.000
	Belanja Pemeliharaan	3.999.378.573
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.293.393.927
0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	29.172.000
0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.358.747.795
0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	41.865.175

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

	Uraian	Jumlah
2.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	20.000.000
2.0111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	9.939.600
2.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	170.000.000
2.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	16.000.000
2.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	449.922.885
2.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	220.990.366
2.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	20.500.000
2.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	91.325.000
2.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	86.819.816
2.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	20.965.190
2.0447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	5.278.500
2.0448	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	10.740.600
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.692.884.646
3.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.324.082.675
3.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	219.409.000
3.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	149.392.971
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	759.100.000
4.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	400.000.000
4.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	200.000.000
4.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	100.000.000
4.0105	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	28.500.000
4.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	2.500.000
4.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	28.100.000
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.000.000
5.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	18.000.000
	Belana Perjalanan Dinas	38.103.097.741
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.103.097.741
1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.528.759.141
1.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	11.058.675.000
1.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.130.663.600

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

	Uraian	Jumlah
0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	385.000.000
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.072.829.000
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.880.500.000
0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	90.500.000
0003	Belanja Beasiswa	830.000.000
0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	3.960.000.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.192.329.000
0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.192.329.000
	Belanja Barang dan Jasa BOS	10.711.569.271
	Belanja Barang dan Jasa BOS	10.711.569.271
0888	Belanja Barang dan Jasa BOS	10.711.569.271
	Belanja Bunga	9.179.907.201
	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	9.179.907.201
	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	9.179.907.201
0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	9.179.907.201
	Belanja Hibah	6.454.580.175
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.752.200.000
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	605.000.000
0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	605.000.000
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.417.200.000
0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.417.200.000
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.300.000.000
0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.300.000.000
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	7.023.801.75
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	7.023.801.75
0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	7.023.801.75
	Belanja Bantuan Sosial	26.020.000.000
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	26.020.000.000

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

	Uraian	Jumlah
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.602.000.000
1.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.602.000.000
	BELANJA MODAL	359.944.334.829
	Belanja Modal Tanah	3.532.836.319
	Belanja Modal Tanah	3.532.836.319
	Belanja Modal Tanah Persil	3.382.836.319
1.0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	370.999.999
1.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	3.011.836.320
	Belanja Modal Lapangan	150.000.000
1.0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	150.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.028.918.177
	Belanja Modal Alat Besar	8.500.000
	Belanja Modal Alat Bantu	8.500.000
0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	8.500.000
	Belanja Modal Alat Angkutan	1.640.954.861
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.601.123.861
0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Sermotor Perorangan	1.091.583.600
0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	509.540.261
	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	39.831.000
0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	39.831.000
	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	110.000.000
	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	110.000.000
0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	110.000.000
	Belanja Modal Alat Pertanian	1.250.216.202
	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.250.216.202
0003	Belanja Modal Alat Panen	850.000.000
0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	19.826.207
0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	380.389.995
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.785.334.124
	Belanja Modal Alat Kantor	218.128.218
0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10.347.000
0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	207.781.218
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.321.239.484
0001	Belanja Modal Mebel	1.064.032.147
0003	Belanja Modal Alat Pembersih	7.608.679

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

	Uraian	Jumlah
1.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	146.070.034
1.0005	Belanja Modal Alat Dapur	798.914
1.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	102.729.710
1	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	245.966.422
1.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	28.081.620
1.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	21.624.000
1.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	196.260.802
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	116.943.343
	Belanja Modal Alat Studio	116.943.343
1.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	11.651.838
1.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	101.646.833
1.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	3.644.672
	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	43.821.766.209
	Belanja Modal Alat Kedokteran	43.808.015.713
1.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	10.168.029.364
1.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	469.139.773
1.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	6.478.841.360
1.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	6.268.817.359
1.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	530.917.026
1.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.539.862.583
1.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	17.515.217.794
1.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	823.990.454
1.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	13.200.000
2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	13.750.496
2.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	13.750.496
	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.839.150.740
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	649.676.925
1.0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia	1.836.000
1.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	454.108.575
1.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	193.732.350
3	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.189.473.815
3.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	981.750
3.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	207.820
3.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	2.337.500.000
3.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	954.534.245

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

	Uraian	Jumlah
	Belanja Modal Komputer	1.981.870.035
	Belanja Modal Komputer Unit	1.704.361.743
0002	Belanja Modal Personal Computer	1.704.361.743
	Belanja Modal Peralatan Komputer	277.508.292
0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	242.424.651
0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	35.083.641
	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	9.302.400
	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	9.302.400
0004	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	9.302.400
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.464.880.263
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.464.880.263
8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.464.880.263
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.179.804.413
	Belanja Modal Bangunan Gedung	92.777.000.681
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	92.777.000.681
0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.050.845.065
0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	150.006.136
0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	66.110.195.057
0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat ibadah	7.184.863.187
0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	11.085.966.041
0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	800.005.586
0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	470.532.292
0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	198.180.000
0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	670.242.130
0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	91.004.537
0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.890.160.650
0036	Belanja Modal Taman	75.000.000
	Belanja Modal Monumen	1.87.000.000
	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	1.87.000.000
0003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	1.87.000.000
	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.215.803.732
	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.215.803.732
0004	Belanja Modal Pagar	1.215.803.732
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.200.901.458
	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	184.468.723.801

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

	Uraian	Jumlah
	Belanja Modal Jalan	157.340.223.801
0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	151.380.155.700
0005	Belanja Modal Jalan Desa	5.810.068.101
0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	150.000.000
	Belanja Modal Jembatan	27.128.500.000
0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	27.128.500.000
	Belanja Modal Bangunan Air	5.359.666.301
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.442.657.210
0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	9.090.910
0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	2.355.141.300
0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.078.425.000
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	817.009.091
0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	400.000.000
0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	417.009.091
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	100.000.000
0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	100.000.000
	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0
0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	0
	Belanja Modal Instalasi	10.106.511.356
	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	9.582.518.316
0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	9.582.518.316
	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	506.092.000
0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	506.092.000
	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	17.901.040
0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	17.901.040
	Belanja Modal Jaringan	2.66.000.000
	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.96.000.000
0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	1.96.000.000
	Belanja Modal Jaringan Listrik	70.000.000
0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	70.000.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.001.874.462
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	17.925.940
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	17.925.940

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

	Uraian	Jumlah
0001	Belanja Modal Audio Visual	17.925.940
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	459.000
	Belanja Modal Tanda Penghargaan	459.000
0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	459.000
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	175.920.000
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	175.920.000
0006	Belanja Modal Kajian	175.920.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	807.569.522
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	807.569.522
3888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	807.569.522
	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.200.000.000
	Belanja Tidak Terduga	4.200.000.000
	Belanja Tidak Terduga	4.200.000.000
	Belanja Tidak Terduga	4.200.000.000
0001	Belanja Tidak Terduga	4.200.000.000
	BELANJA TRANSFER	134.657.779.427
	Belanja Bagi Hasil	1.000.000.000
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	598.784.788
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	598.784.788
0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	598.784.788
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	401.215.212
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	401.215.212
0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	401.215.212
	Belanja Bantuan Keuangan	133.657.779.427
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	133.657.779.427
	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	132.880.726.000
0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	132.880.726.000
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	7.770.534.27
0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	7.770.534.27
	Jumlah Belanja	976.341.688.422
	Total Surplus/(Defisit)	(216.732.129.267)

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

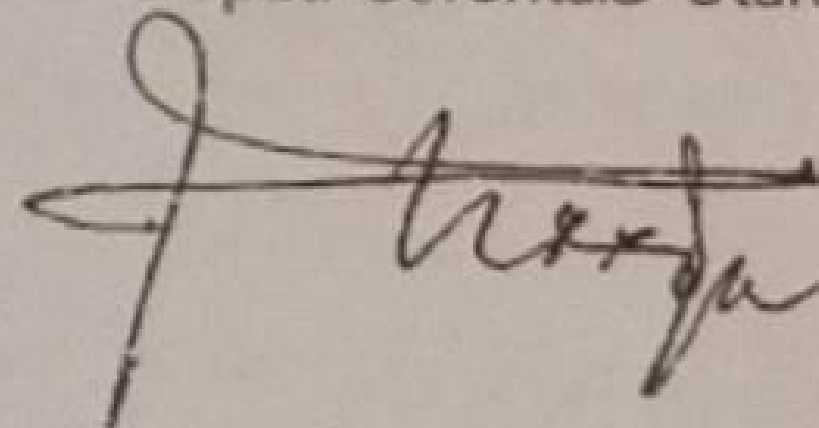
	Uraian	Jumlah
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	229.370.170.354
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.370.170.354
	Pelampauan Penerimaan PAD	740.393.878
	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	740.393.878
0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Rokok	740.393.878
	Penghematan Belanja	35.629.776.476
	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	19.729.776.476
0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	2.375.363.591
0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	500.000.000
0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.004.412.885
0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	100.000.000
0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	12.500.000.000
0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	500.000.000
0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	2.500.000.000
0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	250.000.000
	Penghematan Belanja-Belanja Modal	15.500.000.000
0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	500.000.000
0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	7.500.000.000
0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	7.500.000.000
	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	150.000.000
0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	150.000.000
	Sisa Belanja Transfer	250.000.000
0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	250.000.000
	Penerimaan Pinjaman Daerah	193.000.000.000
	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	193.000.000.000
	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	193.000.000.000
0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	193.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	229.370.170.354
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	126.38.041.087
	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000
	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15.000.000.000
	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000
0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Gorontalo Utara
Nomor : 36 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN
ANGGARAN 2022

	Uraian	Jumlah
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	11.138.041.087
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	11.138.041.087
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	9.087.384.774
X01	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	9.087.384.774
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek	2.050.656.313
X01	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek	2.050.656.313
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.638.041.087
	Pembiayaan Netto	216.732.129.267

Bupati Gorontalo Utara



Indra Yasin, SH, MH